



Volume 11 No. 1 Januari 2026
p-ISSN: 2477-8192 dan e-ISSN: 2502-2776

Analisis Kemiskinan Keluarga Nelayan Suku Bajo

Suryani Suryani*, Rosmini Maru, Sukri Nyompa, Hasriyanti Hasriyanti,
Amal Arfan, Saiful Hardiyansyah

Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Makassar

Email: suryani12988@gmail.com; rosmini.maru@unm.ac.id;
sukrinyompa@unm.ac.id; hasriyanti@unm.ac.id; amalarfan@unm.ac.id; saifulhardiyansyah18@gmail.com

(Received: 7 Mei 2025; Revised: 7 Juli 2025; Accepted: 18 November 2025; Published: 2 Januari 2026)



©2026 – Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>).

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional condition influenced by various factors, such as economic, educational, health, and socio-cultural conditions. This study aims to describe the characteristics of poverty among the Bajo fishing community in Lamanggau Village. The research method used is descriptive qualitative through interviews and direct observation, as well as quantitative data support from survey results. The results show that the poverty of the Bajo fishing community is influenced by low levels of education, where the majority of heads of families only completed elementary school. Low education has implications for limited skills and job options, so they remain dependent on the hereditary profession of fishing. Economically, the average income of the head of a family is only around Rp. 500,000 per month, with a relatively large number of dependents, so it is unable to meet basic needs. In addition, inadequate housing conditions, limited access to clean water that must be brought in from neighboring villages, and uneven lighting further worsen the community's quality of life. From a health perspective, the lack of sanitation and the risks of working as a fisherman also increase vulnerability to poverty. Overall, the characteristics of poverty in the Bajo fishing community in Lamanggau Village are structural and cultural, thus requiring integrated policy interventions to improve education, repair basic infrastructure, and expand economic opportunities for the fishing community.

Keywords: poverty; coast; fishermen; Bajo, Lamanggau.

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan kondisi multidimensional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kondisi sosial-kultural. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik kemiskinan masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan observasi langsung, serta dukungan data kuantitatif dari hasil survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat nelayan Bajo dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, di mana mayoritas kepala keluarga hanya menamatkan Sekolah Dasar. Rendahnya pendidikan berimplikasi pada terbatasnya keterampilan dan pilihan pekerjaan, sehingga mereka tetap bergantung pada profesi nelayan secara turun-temurun. Secara ekonomi, pendapatan rata-rata kepala keluarga hanya sekitar Rp.500.000 per bulan, dengan jumlah tanggungan yang relatif besar, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, kondisi permukiman yang tidak layak, keterbatasan akses air bersih yang harus didatangkan dari desa tetangga, serta penerangan yang belum merata semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dari aspek kesehatan, minimnya sanitasi dan risiko kerja sebagai nelayan turut memperkuat kerentanan terhadap kemiskinan. Secara keseluruhan, karakteristik kemiskinan masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau bersifat struktural dan kultural, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan pendidikan, memperbaiki infrastruktur dasar, serta memperluas peluang ekonomi masyarakat nelayan.

Kata Kunci: kemiskinan; pesisir; nelayan; Bajo; Lamanggau.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah baik dari sektor daratan maupun lautan. Jika dikelola secara optimal, potensi tersebut seharusnya mampu menjadi penggerak utama pembangunan nasional. Namun demikian, Indonesia hingga masih tergolong sebagai negara berkembang yang menghadapi berbagai permasalahan sosial, budaya, dan ekonomi, salah satunya adalah persoalan kemiskinan.

Kemiskinan merupakan isu global yang bersifat kompleks dan multidimensional. Di negara berkembang termasuk Indonesia, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga terkait dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, keterampilan kerja, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Sopiah dan Haryatiningsih (2023) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar meskipun secara fisik mampu bekerja. Senada dengan itu, Dewi dkk. (2017) menyatakan bahwa kelompok masyarakat miskin umumnya menghadapi keterbatasan pendidikan, minimnya keterampilan, serta kondisi kesehatan yang kurang memadai sehingga meningkatkan potensi pengangguran dan kerentanan sosial-ekonomi.

Badan Pusat Statistik (2024) mencatat bahwa pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang. Angka ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan struktural dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial, perlindungan sosial, hingga pelatihan pemberdayaan ekonomi sebagai strategi untuk menekan angka kemiskinan. Namun, sebagaimana diungkapkan Ferezagia (2018), upaya pengentasan kemiskinan sering kali menghadapi kendala seperti ketepatan sasaran, ketergantungan bantuan, dan belum maksimalnya program pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat. Selain itu, kemiskinan sering kali diperkuat oleh faktor struktural seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya akses terhadap pasar yang menghambat mobilitas ekonomi masyarakat.

Kemiskinan juga tidak hanya ditemukan di wilayah pedesaan, tetapi terjadi pula pada

kawasan perkotaan maupun daerah pesisir. Salah satu wilayah pesisir yang masih bergelut dengan permasalahan kemiskinan adalah Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Meskipun dikenal memiliki potensi sumber daya laut yang besar, terutama sektor perikanan, kekayaan tersebut belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi sumber daya alam dan kemampuan masyarakat dalam mengelolanya, yang kerap dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, budaya, hingga akses teknologi (Satria, 2015). Fenomena ini menegaskan bahwa keberlimpahan sumber daya tidak otomatis menjamin peningkatan kesejahteraan apabila tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Salah satu komunitas yang terdampak adalah masyarakat Suku Bajo di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, yang mayoritas bekerja sebagai nelayan tradisional. Pola permukiman berupa rumah semi permanen di atas laut menjadi ciri khas komunitas ini, namun sekaligus menggambarkan keterbatasan akses terhadap infrastruktur layak. Pendapatan nelayan Bajo umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan belum mampu menyediakan cadangan ekonomi yang berkelanjutan. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan alternatif, terbatasnya akses modal, serta tingginya jumlah tanggungan keluarga semakin memperkuat kondisi kemiskinan yang bersifat kultural maupun struktural. Keterikatan masyarakat Bajo pada tradisi melaut dan pola hidup subsisten juga turut mempengaruhi lambatnya transformasi ekonomi menuju sistem penghidupan yang lebih adaptif.

Intervensi pemerintah daerah dan pusat dalam konteks ini menjadi sangat penting, terutama dalam peningkatan produktivitas nelayan melalui pelatihan, penyediaan teknologi penangkapan yang lebih modern, serta perluasan akses modal usaha. Selain itu, pemahaman terhadap karakteristik kemiskinan berbasis budaya (*cultural poverty*) menjadi kunci untuk merumuskan strategi pemberdayaan yang tepat sasaran bagi komunitas nelayan pesisir. Pendekatan pembangunan yang sensitif budaya diperlukan agar program pemberdayaan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai lokal, tetapi justru mampu mengoptimalkan potensi sosial masyarakat Bajo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kemiskinan keluarga nelayan Suku Bajo di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia dengan fokus pada faktor-faktor penyebab kemiskinan kultural yang mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih kontekstual bagi masyarakat pesisir kepulauan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi secara alami tanpa adanya intervensi dari peneliti. Pendekatan ini berfokus pada penggambaran realitas apa adanya, berdasarkan perspektif, pengalaman, dan pemaknaan subjek penelitian. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena sesuai untuk menggali karakteristik kemiskinan kultural yang dialami masyarakat, memahami konteks sosial yang melatarinya, serta mendeskripsikan secara rinci bagaimana masyarakat Bajo menjalani aktivitas hidupnya dalam situasi yang sebenarnya. Dengan demikian, penelitian ini mampu menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab kemiskinan dan kondisi sosial ekonomi yang terjadi di lapangan.

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Desa ini merupakan salah satu pemukiman masyarakat Suku Bajo yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan tradisional. Lokasi ini dipilih secara purposif karena memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang relevan dengan fokus penelitian mengenai kemiskinan keluarga nelayan.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2024. Rentang waktu ini dipilih agar peneliti dapat mengamati aktivitas masyarakat nelayan dalam kondisi yang berjalan secara alami dan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kehidupan

keseharian keluarga nelayan Suku Bajo di Desa Lamanggau.

Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2019), dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel seperti pada penelitian kuantitatif. Sebaliknya, penelitian kualitatif menggunakan situasi sosial atau informan yang dipilih secara purposif sesuai dengan kebutuhan data. Informan adalah individu yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti sehingga dapat memberikan informasi mendalam kepada peneliti.

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari masyarakat miskin yang tinggal di permukiman nelayan Suku Bajo di Desa Lamanggau. Penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu memilih individu yang dianggap dapat memberikan data yang relevan mengenai kondisi sosial-ekonomi, karakteristik kemiskinan, serta dinamika kehidupan masyarakat nelayan Bajo.

Berdasarkan Data Pemerintah Desa Lamanggau Tahun 2024, jumlah kepala keluarga yang tinggal di wilayah tersebut adalah 105 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, peneliti memilih secara purposif yang mencakup kepala keluarga, ibu rumah tangga, tokoh adat, tokoh agama, dan nelayan aktif yang dianggap memahami konteks kehidupan masyarakat dan paling mampu memberikan informasi mendalam terkait fokus penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid dan relevan. Tanpa penguasaan teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang memenuhi standar kualitas yang diperlukan (Sugiyono, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung di lingkungan masyarakat nelayan Suku Bajo di Desa Lamanggau. Adapun wawancara dilakukan secara langsung kepada informan di wilayah penelitian untuk menggali pengalaman, pandangan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan keluarga nelayan. Pertanyaan bersifat terbuka agar informan dapat memberikan penjelasan

yang luas sesuai konteks kehidupan. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan panduan kuesioner sederhana sebagai instrumen bantu untuk menelusuri aspek-aspek tertentu, seperti kondisi sosial ekonomi, kondisi tempat tinggal, dan pekerjaan utama. Meskipun demikian, kuesioner tidak bersifat kuantitatif, tetapi digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung lingkungan permukiman, pola aktivitas sehari-hari, serta interaksi sosial masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih otentik dan mendalam mengenai realitas hidup masyarakat di Desa Lamangau.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dipadukan dengan analisis kuantitatif sederhana. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif: data numerik memberikan informasi faktual mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sedangkan data kualitatif memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual terkait pengalaman hidup, persepsi, serta dinamika sosial-budaya masyarakat nelayan Suku Bajo.

Data primer dikumpulkan melalui tiga teknik utama yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sebagaimana diuraikan oleh Miles dkk. (2014).

Observasi dilakukan secara langsung di lingkungan permukiman masyarakat nelayan Bajo untuk menangkap fenomena sosial yang terjadi secara alami. Observasi ini mencakup pengamatan terhadap pola aktivitas sehari-hari, interaksi sosial, kondisi permukiman, akses terhadap fasilitas publik, serta strategi adaptasi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan ekonomi.

Pendekatan observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif terbatas, di mana peneliti hadir sebagai pengamat luar namun tetap menjaga jarak analitis. Hasil observasi dicatat dalam catatan lapangan (*field notes*) dan didukung dokumentasi visual seperti foto lingkungan. Data observasi digunakan sebagai sumber informasi utama sekaligus bahan

triangulasi untuk memvalidasi temuan dari wawancara dan kuesioner.

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi kualitatif mengenai pengalaman hidup, pandangan, nilai budaya, serta faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di komunitas nelayan Bajo. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali isu-isu baru yang muncul tanpa keluar dari kerangka penelitian. Seluruh wawancara direkam dengan persetujuan informan, ditranskripsi verbatim, dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Proses analisis meliputi pengkodean, penentuan kategori, identifikasi pola, dan penarikan tema-tema utama yang menggambarkan dinamika sosial-ekonomi masyarakat Bajo.

Kuesioner tertutup digunakan untuk memperoleh data kuantitatif sederhana yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga, seperti jumlah anggota keluarga, tanggungan, pendapatan, sumber penghasilan, pendidikan, serta kepemilikan aset dan akses layanan dasar.

Kuesioner disebarkan kepada responden yang ditentukan secara purposif, mempertimbangkan keberagaman karakteristik keluarga nelayan Bajo. Data kuesioner dianalisis melalui tabulasi frekuensi dan persentase, sehingga memberikan informasi kuantitatif mengenai distribusi karakteristik sosial-ekonomi masyarakat. Analisis kuantitatif sederhana ini berfungsi memperkuat hasil analisis kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

HASIL PENELITIAN

Masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamangau pada umumnya bekerja sebagai nelayan. Profesi ini telah dijalani sejak lama bahkan sebagian informan mengaku telah menekuni pekerjaan ini selama puluhan tahun. Di Dusun Lasoilo, yaitu wilayah tempat komunitas nelayan Bajo bermukim terdapat 105 kepala keluarga dengan jumlah tanggungan yang bervariasi. Tantangan kehidupan sehari-hari yang dihadapi cukup besar, terutama karena pendapatan yang diperoleh tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Kondisi tersebut mendorong para kepala keluarga untuk terus melaut, menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian hasil tangkapan. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

menyebabkan masyarakat nelayan Bajo belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai maka penelitian ini mempertimbangkan beberapa indikator yang berkaitan langsung dengan kondisi kepala keluarga sebagai penanggung jawab ekonomi rumah tangga. Indikator tersebut meliputi: a) jumlah tanggungan keluarga; b) produktivitas usia kepala keluarga; c) tingkat pendidikan kepala keluarga; d) jumlah pendapatan yang diperoleh; e) kualitas rumah yang ditinggali; f) sumber penerangan yang digunakan; dan g) sumber air yang tersedia bagi rumah tangga.

Ketujuh indikator tersebut menjadi acuan utama dalam menganalisis kondisi sosial-ekonomi masyarakat karena seluruhnya saling

berkaitan dan menggambarkan realitas kehidupan sehari-hari komunitas nelayan Bajo di Desa Lamanggau.

Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan dalam sebuah keluarga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya, semakin besar pula beban ekonomi yang harus ditanggung oleh kepala keluarga. Penelitian ini membagi jumlah tanggungan kepala keluarga dalam ≤ 4 orang dan ≥ 4 orang. Adapun jumlah tanggungan kepala keluarga dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Tanggungan Kepala Keluarga

No.	Rata-Rata Jumlah Tanggungan	Jumlah	Persentase (%)
1	≤ 4 Orang	40	38,10
2	≥ 4 Orang	65	61,90
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Berdasarkan Tabel 1 dapat disimpulkan jumlah kepala keluarga yang memiliki jumlah tanggungan di atas 4 orang adalah 65 orang. Jumlah tanggungan sangat berpengaruh karena ikut mempengaruhi pengeluaran. Pola hidup masyarakat nelayan yang masih konsumtif serta pendapatan yang tidak memadai menyebabkan banyak anggota keluarga yang masih jauh dari kesejahteraan. Situasi ini menunjukkan bahwa kapasitas pendapatan rumah tangga belum mampu mengimbangi kebutuhan dasar yang terus meningkat.

Umur Kepala Keluarga

Umur memengaruhi tingkat produktivitas, kekuatan kerja, serta kondisi kesehatan kepala keluarga. Ketiga aspek tersebut secara tidak langsung menentukan kemampuan nelayan dalam melaut secara optimal. Batasan usia produktif di Indonesia berada pada kisaran 15–59 tahun, sehingga rentang ini digunakan sebagai dasar dalam menilai tingkat produktivitas kepala keluarga nelayan. Adapun karakteristik umur kepala keluarga ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kepala Keluarga Berdasarkan Umur

No.	Rentang Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	< 35	8	7,62
2	35 – 55	85	80,95
3	> 55	12	11,43
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Berdasarkan Tabel 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas kepala keluarga nelayan Bajo berada pada kategori usia produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga masih memiliki kapasitas fisik dan tenaga yang memadai untuk melakukan aktivitas melaut. Meskipun demikian, terdapat pula beberapa kepala keluarga berusia di atas 59 tahun yang masih bekerja sebagai nelayan yang mengindikasikan adanya ketergantungan ekonomi pada sektor perikanan tanpa alternatif pekerjaan lain.

Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

Perairan Wakatobi memiliki kekayaan hayati laut yang tinggi. Meskipun lokasi penangkapan ikan kini cenderung berada pada area yang lebih jauh dari permukiman nelayan. Kondisi ini menuntut kapasitas sumber daya manusia yang semakin baik. Kualitas sumber daya manusia sangat terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kepala keluarga nelayan Bajo. Adapun tingkat pendidikan setiap kepala keluarga dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak sekolah	20	19,05
2	Tamat SD	68	64,76
3	Tamat SMP	12	11,43
4	Tamat SMA	5	4,76
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Berdasarkan Tabel 3 tersebut terlihat bahwa hanya lima kepala keluarga yang berhasil menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (wajib belajar 12 tahun). Kondisi ini menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan antara capaian pendidikan masyarakat dan harapan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Rendahnya tingkat pendidikan berimplikasi pada terbatasnya wawasan, keterampilan, serta peluang masyarakat untuk mengembangkan sumber pendapatan di luar sektor penangkapan ikan. Peningkatan kualitas SDM pada akhirnya akan

mendorong masyarakat untuk memiliki daya saing, kreativitas dalam penangkapan, pengelolaan, maupun pemasaran hasil laut, sehingga para nelayan tidak sepenuhnya bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan sepanjang hidupnya.

Jumlah Pendapatan Kepala keluarga

Pendapatan sangat berkaitan erat dengan jumlah tanggungan yang dimiliki oleh setiap keluarga. Rata-rata pendapatan kepala keluarga nelayan bajo desa Lamanggau berdasarkan hasil penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga

No.	Jumlah Pendapatan/Bulan	Jumlah	Persentase (%)
1	< 200.000	20	19,04
2	> 200.000 – 500.000	70	66,67
3	> 500.000	15	14,29
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki tingkat pendapatan bulanan yang belum memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Kondisi ini semakin diperberat oleh jumlah tanggungan yang relatif besar dalam setiap keluarga. Oleh karena itu, diperlukan adanya sumber pendapatan tambahan agar kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi secara layak.

Kualitas Rumah

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas, hujan, serta sebagai

ruang untuk beristirahat setelah melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Bagi komunitas nelayan Bajo di Desa Lamanggau, rumah memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian dari adaptasi terhadap lingkungan pesisir. Sebagian besar masyarakat membangun rumah panggung di atas permukaan air, sesuai dengan tradisi dan kondisi geografis setempat. Di samping itu, terdapat pula keluarga yang menimbun sebagian area perairan untuk mendirikan rumah semi permanen. Persentase jenis rumah yang dihuni masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Bentuk Rumah

No.	Tipe Rumah	Jumlah	Persentase (%)
1	Semi Permanen	25	23,80
2	Rumah Panggung	80	72,20
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Secara umum, rumah panggung di Desa Lamanggau dibangun dengan menancapkan kayu berdiameter besar sebagai tiang penyangga. Kayu yang digunakan umumnya dipilih dari jenis yang memiliki ketahanan tinggi agar mampu bertahan dalam jangka waktu lama meskipun selalu bersentuhan dengan air laut. Pada beberapa rumah panggung, masyarakat juga menggunakan tiang berbahan semen, yang umumnya diperoleh melalui bantuan program perumahan dari pemerintah.

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa rumah panggung merupakan tipe hunian yang paling dominan dengan jumlah 80 unit, sedangkan 25 rumah lainnya tergolong sebagai rumah semi permanen yang dibangun di atas lahan hasil timbunan di area pesisir. Konstelasi jenis hunian tersebut menunjukkan pola adaptasi masyarakat Bajo terhadap kondisi lingkungan pesisir sekaligus mencerminkan

keterbatasan ekonomi yang memengaruhi kualitas konstruksi rumah yang di bangun.

Sumber Penerangan

Penerangan merupakan kebutuhan penting bagi setiap keluarga nelayan. Selain sebagai sumber cahaya pada malam hari, keberadaan penerangan listrik juga memiliki fungsi strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Bagi para nelayan, listrik diperlukan untuk mengisi daya senter yang digunakan saat mencari ikan pada malam hari, menerangi jalur akses menuju rumah atau dermaga, serta membantu menandai lokasi tambatan perahu ketika kembali dari melaut pada waktu malam. Listrik yang memadai juga berkontribusi pada kenyamanan dan keamanan lingkungan di malam hari. Distribusi penggunaan pola penggunaan sumber penerangan, khususnya penggunaan lampu listrik masyarakat dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sumber Penerangan

No.	Tipe Rumah	Jumlah	Persentase (%)
1	Sendiri	90	85,72
2	Listrik Tetangga	15	14,28
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Berdasarkan Tabe 6, mayoritas masyarakat nelayan Bajo telah memiliki akses terhadap penerangan listrik mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sumber penerangan dianggap sangat penting, baik untuk menunjang aktivitas rumah tangga maupun untuk mendukung pekerjaan sebagai nelayan.

Sumber Air Bersih

Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Perannya sangat vital karena hampir seluruh aktivitas sehari-hari bergantung pada

ketersediaan air, terutama untuk konsumsi, memasak, mandi, dan mencuci. Bagi masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau, keberadaan sumber air bersih memiliki arti yang sangat penting dalam menunjang kehidupan rumah tangga maupun aktivitas sosial. Ketergantungan yang tinggi terhadap air bersih juga dipengaruhi oleh kondisi permukiman yang sebagian besar berada di atas laut, sehingga akses terhadap sumber air layak menjadi sebuah tantangan tersendiri. Sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Sumber Air Bersih

No.	Sumber Air	Jumlah	Persentase (%)
1	Pribadi	0	0
2	Tetangga	105	100
Total		105	100

Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2024.

Sumber air merupakan komoditas vital bagi masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau. Kondisi geografis permukiman yang berada di atas laut menyebabkan wilayah tersebut tidak memiliki akses langsung terhadap sumber air bersih. Akibatnya,

masyarakat harus memperoleh air dari desa tetangga yang berjarak sekitar 2 km, yaitu Desa Teemoane. Untuk memenuhi kebutuhan harian, sebagian warga menyambungkan pipa ke jalur pipa induk dari desa tersebut, sementara sebagian lainnya mengambil air secara manual

menggunakan jeriken yang diangkut dengan perahu atau sampan. Biasanya, masyarakat akan mengisi puluhan jeriken di Desa Teemoane, kemudian membawanya kembali ke permukimannya setelah seluruhnya terisi penuh.

Hingga saat ini, masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau sepenuhnya bergantung pada sumber air bersih dari Desa Teemoane. Air tersebut digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mandi, dan aktivitas domestik lainnya. Ketergantungan ini telah berlangsung dari generasi ke generasi dan menjadi bagian dari pola hidup masyarakat Bajo akibat keterbatasan sumber daya air di lingkungan tempat tinggal.

PEMBAHASAN

Karakteristik kemiskinan masyarakat nelayan Desa Lamanggau Suku Bajo dapat ditelaah melalui sejumlah faktor utama, yaitu aspek sosial-kultural, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kondisi tempat tinggal, serta akses terhadap air bersih. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya keterkaitan sistemik antara struktur sosial masyarakat pesisir dan kemiskinan multidimensi yang di alami, sebagaimana lazim terjadi di komunitas nelayan lainnya di Indonesia (Suharto, 2009). Pendekatan multidimensi ini menjadi penting karena kemiskinan pada masyarakat pesisir tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola hidup, budaya kerja, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Hal ini sejalan dengan temuan kajian perikanan skala kecil (*small-scale fisheries*) yang menyebutkan bahwa kemiskinan nelayan merupakan kombinasi faktor ekologis, ekonomi, dan kelembagaan sehingga tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel saja (Stacey dkk., 2021).

Sebagian besar masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau secara turun-temurun bekerja sebagai nelayan. Pola pikir ini telah mengakar kuat, sehingga profesi nelayan dianggap sebagai satu-satunya pilihan pekerjaan. Minimnya eksposur terhadap alternatif pekerjaan serta kurangnya intervensi pelatihan keterampilan membuat para nelayan terjebak dalam pola pekerjaan tradisional. Hal ini memperkuat ketergantungan terhadap hasil tangkapan harian dan mempersempit peluang mobilitas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial dan budaya turut

memainkan peran dalam melanggengkan kemiskinan kultural di komunitas tersebut. Studi etnografi tentang masyarakat Bajo juga menunjukkan bahwa identitas budaya sebagai “orang laut” membentuk preferensi pekerjaan dan pola interaksi dengan lingkungan sehingga perubahan profesi sering dianggap tidak sesuai dengan nilai budaya lokal (Adhuri dkk., 2016).

Hasil survei menunjukkan bahwa 64,76% kepala keluarga hanya menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Dasar, sementara hanya 4,76% yang menamatkan pendidikan hingga SMA. Rendahnya tingkat pendidikan ini disebabkan oleh budaya kerja dini yang diwariskan secara turun-temurun. Anak-anak sering kali berhenti sekolah untuk membantu orang tua melaut. Akibatnya, kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi yang lebih luas menjadi sangat terbatas. Rendahnya capaian pendidikan ini juga berdampak pada terbatasnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika ekonomi modern. Rendahnya pendidikan formal merupakan ciri umum kemiskinan nelayan di Asia Tenggara, karena pendidikan menentukan kemampuan adaptasi nelayan terhadap teknologi perikanan baru dan akses terhadap pekerjaan non-perikanan (Taufik dkk., 2023).

Pendapatan bulanan sebagian besar keluarga berkisar antara Rp.200.000 hingga Rp.500.000 (66,67%), dan 19,04% bahkan di bawah Rp.200.000. Dengan tanggungan keluarga yang rata-rata lebih dari empat orang (61,9%), pendapatan ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, pola konsumsi yang kurang produktif misalnya, tidak adanya tabungan atau investasi dalam alat tangkap atau pendidikan anak memperparah kondisi ekonomi keluarga nelayan. Ketergantungan pada pendapatan harian yang tidak stabil menjadikan keluarga nelayan berada dalam situasi rentan, terutama ketika menghadapi musim paceklik atau cuaca ekstrem. Nelayan kecil sangat rentan terhadap fluktuasi cuaca, pasar, dan musim, sehingga berada dalam kondisi “*poverty traps*” atau lingkaran kemiskinan yang sulit diputus tanpa intervensi kelembagaan (Stacey dkk., 2021).

Profesi sebagai nelayan juga menghadirkan risiko kesehatan yang tinggi. Beberapa penyakit yang umum diderita di antaranya penyakit kulit, gangguan pernapasan, dan dekompresi akibat menyelam. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sanitasi dan fasilitas

kesehatan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi mengenai keselamatan kerja serta menyediakan layanan kesehatan keliling atau pos kesehatan desa yang lebih aktif menjangkau masyarakat pesisir. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan turut memperpanjang siklus kerentanan yang dialami keluarga nelayan. Hal ini sesuai dengan penelitian di komunitas pesisir Asia yang menemukan bahwa nelayan memiliki risiko kesehatan yang lebih tinggi karena paparan lingkungan laut, kurangnya alat pelindung diri, dan jauhnya akses layanan kesehatan (Stacey dkk., 2021).

Sebanyak 72,2% keluarga tinggal di rumah panggung di atas laut, sementara 23,8% tinggal di rumah semi permanen. Kondisi hunian ini umumnya tidak layak dan tidak memenuhi standar sanitasi. Bantuan pembangunan rumah layak huni masih sangat terbatas dan tidak merata. Lingkungan fisik yang kurang mendukung ini tidak hanya memengaruhi kesehatan, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Idealnya, program seperti Rumah Swadaya dari Kementerian PUPR dapat diperluas ke wilayah ini untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal masyarakat nelayan. Kondisi permukiman pesisir yang buruk, terutama rumah panggung tanpa sanitasi, berdampak langsung pada kesehatan, keamanan, dan kerentanan sosial-ekonomi (Stacey dkk., 2021).

Seluruh masyarakat (100%) mengandalkan air bersih dari Desa Teemoane yang berjarak sekitar 2 km. Tidak adanya sumber air tanah akibat intrusi air laut menyebabkan masyarakat harus mengangkut air menggunakan perahu dan jeriken. Ketergantungan ini sangat menyulitkan dan menyita waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih masih menjadi tantangan utama yang memerlukan intervensi segera. Intervensi seperti instalasi tangki penampung air hujan skala rumah tangga atau sambungan pipa dari desa tetangga perlu diprioritaskan. Situasi ini sesuai dengan tren umum desa pesisir di negara berkembang yang menghadapi intrusi air laut dan ketergantungan pada sumber eksternal, sehingga menghambat produktivitas ekonomi dan kesehatan keluarga (Stacey dkk., 2021).

Solusi yang direkomendasikan mencakup berbagai aspek. Di bidang pendidikan dan sumber daya manusia,

pemerintah desa bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat perlu menyelenggarakan program Kejar Paket dan memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan. Dalam hal diversifikasi ekonomi, Dinas Koperasi dan UKM perlu memberikan pelatihan dan modal usaha berbasis potensi lokal seperti pengolahan hasil laut. Di bidang kesehatan dan sanitasi, Dinas Kesehatan perlu membuka layanan Puskesmas keliling dan meningkatkan sosialisasi mengenai sanitasi rumah tangga. Untuk perumahan dan infrastruktur dasar, perluasan program pembangunan rumah layak huni dan sambungan air bersih dari PDAM harus diprioritaskan. Selain itu, penguatan kelembagaan lokal dan peningkatan partisipasi komunitas melalui tokoh adat dan tokoh agama sangat penting untuk mendorong perubahan pola pikir, terutama terkait pendidikan dan peluang ekonomi alternatif. Dengan pendekatan multidimensi yang terintegrasi, diharapkan masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau dapat keluar dari jeratan kemiskinan struktural dan kultural yang selama ini membelenggu para nelayan. Pendekatan yang menggabungkan perbaikan struktural (akses pasar, infrastruktur, perlindungan sosial) dan perubahan kultural (pendidikan, perubahan norma, diversifikasi kerja) telah terbukti paling efektif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di berbagai negara pesisir (Stacey dkk., 2021), sehingga strategi serupa sangat relevan untuk konteks Desa Lamanggau.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau bersifat multidimensional, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, kondisi permukiman, akses dasar, dan budaya kerja. Pendapatan rata-rata sekitar Rp.500.000 per bulan dengan jumlah tanggungan keluarga yang besar menyebabkan masyarakat hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa peluang menabung atau berinvestasi. Rendahnya tingkat pendidikan baik anak-anak maupun kepala keluarga membatasi akses para nelayan terhadap pekerjaan alternatif di luar sektor perikanan.

Kondisi permukiman yang tidak layak, keterbatasan akses air bersih yang harus diambil dari desa tetangga, serta infrastruktur penerangan yang belum merata semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Selain itu, pola pekerjaan nelayan yang

diwariskan secara turun-temurun tanpa diversifikasi mata pencaharian memperkuat ketergantungan pada hasil tangkapan harian.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan di Desa Lamanggau memerlukan pendekatan terpadu, meliputi peningkatan pendidikan dan keterampilan, perbaikan infrastruktur dasar (air bersih, rumah layak huni, sanitasi, dan listrik), serta program pemberdayaan ekonomi yang mendorong diversifikasi pendapatan. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan struktural yang dialami masyarakat nelayan Bajo.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat nelayan Bajo di Desa Lamanggau mengenai tantangan kehidupan ke depan, khususnya terkait pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan. Temuan penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong perubahan pola pikir masyarakat untuk mulai mempertimbangkan pekerjaan tambahan yang produktif sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada profesi nelayan.

Selain itu, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah perlu memfokuskan program bantuan serta pelatihan bagi masyarakat nelayan Bajo guna meningkatkan keterampilan, memperluas peluang kerja, dan memperbaiki taraf hidup sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Prof. Rosmini Maru, S.Pd. M.Si., Ph.D., selaku pembimbing I dan bapak Prof. Drs. Sukrin Nyompa, S.H. M.Si., Ph.D., selaku pembimbing II, Pemerintah Desa Lamanggau Kecamatan Tomia, serta *reviewer* editor Jurnal Penelitian dan Pendidikan Geografi.

DAFTAR PUSTAKA

Adhuri, D. S., Rachmawati, L., Sofyanto, H., and Hamilton-Hart, N. (2016). Green Market for Small People: Markets and Opportunities for Upgrading in Small-Scale Fisheries in Indonesia. *Marine Policy*, 63, 198-205.

<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.021>

Badan Pusat Statistik. (2024, Juli 1). *Persentase penduduk miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*.

Dewi, N., Yusuf, Y., dan Iyan, R. Y. (2017). Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. *JOM Fekon*, 4(1), 870-882.

Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1), 1-6.

Satria, A. (2015). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sopiah, L., dan Haryatiningsih, R. (2023). Karakteristik Penduduk Miskin dan Penyebab Kemiskinan di Desa Sukagalih. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 69-74.

Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., ... and Fitriana, R. (2021). Developing Sustainable Small-Scale Fisheries Livelihoods in Indonesia: Trends, Enabling and Constraining Factors, and Future Opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia : Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta

Taufik, Y., Wiyanti, N. I., Arimbawa, P., Nikoyan, A., and Nalefo, L. (2023). Livelihood Strategies of the Bajo Fishing Community in the Outbreak of COVID-19 (Study of Bajo People in Salabangka Island of Central, Sulawesi, Indonesia). *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 18(3), 943-951. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180330>